

**SURVEI KECENDERUNGAN PEMILIH PEMULA
TERHADAP STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
CALON PRESIDEN RI 2024
(Studi Kasus Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin)**

OLEH :

NIRWANA FATIMAH AZZAHRA



**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

**SURVEI KECENDERUNGAN PEMILIH PEMULA
TERHADAP STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
CALON PRESIDEN RI 2024
(Studi Kasus Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin)**

OLEH:

NIRWANA FATIMAH AZZAHRA

E021191028

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Departemen Ilmu Komunikasi

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Survei Kecenderungan Pemilih Pemula Terhadap Strategi Komunikasi Politik Calon Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (Studi Kasus Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin)

Nama Mahasiswa : Nirwana Fatimah Azzahra

No. Pokok : E021191028

Makassar, April 2023

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si.
NIP. 196312101991031002

Pembimbing II



Dr. H. Mufasamad Akbar, M.Si.
NIP. 196506271991031004

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



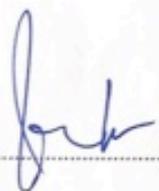
Dr. Sudirman Karnay, M.Si.
NIP. 196410021990021001

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

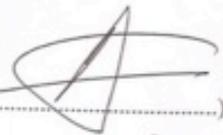
Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Departemen Ilmu Komunikasi Konsentrasi *Public Relations*, pada hari Kamis Tanggal 04 Mei Tahun 2023

Makassar, 4 Mei 2023

Tim Evaluasi

Ketua : Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si. (.....)

Sekretaris : Rahmat Furqan, S. I. Kom., MGMC (.....)

Anggota : 1. Dr. H. Muhammad Akbar, M.Si. (.....)

2. Dr. Das'ad Latif, S. Sos, S. Ag., M.Si. Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirwana Fatimah Azzahra

NIM : E021191028

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Jenjang : S1 (Strata 1)

Saya menyatakan bahwa skripsi komunikasi yang berjudul **“Survei Kecenderungan Pemilih Pemula Terhadap Strategi Komunikasi Politik Calon Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (Studi Kasus Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin)”** ini sepenuhnya adalah karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan duplikasi dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, 04 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Nirwana Fatimah Azzahra

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Survei Kecenderungan Pemilih Pemula Terhadap Strategi Komunikasi Politik Calon Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (Studi Kasus Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin)”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi Salah Satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Pertama-tama ucapan terima kasih penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena untuk kalian berdua.
2. Bapak Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muhammad Akbar, M.Si selaku Pembimbing II penulis yang selalu

memberikan masukan, nasihat, serta sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas waktu dan telah membimbing penulis dengan baik dan penuh kesabaran. Penulis mengucapkan banyakbanyak terima kasih kepada kedua bapak pembimbing terkeren.

3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin (UNHAS), bapak Dr. Sudirman Karnay, M.Si. dan bapak Nosakros Arya, S.Sos.,M.I.Kom. yang telah membantu secara administratif proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis serta terima kasih banyak atas dukungan dan nasihat yang bapak berikan.
4. Para staf Jurusan Ilmu Komunikasi serta staf/pegawai dalam jajaran lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang telah dengan sabar melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi pengurusan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
5. Bapak Ibu Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu yang sangat berharga yang telah bapak ibu berikan kepada penulis. Kebaikan dan ketulusan dari Bapak dan Ibu akan penulis ingat sampai kapanpun.
6. Terima kasih kepada teman-teman KKN yang telah berjuang bersama dalam serangkaian kegiatan KKN. Untuk segala pengetahuan, ilmu dan perhatian yang telah dibagi, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

7. Ucapan terima kasih penulis tujukan buat rekan-rekan Mahasiswa y termasuk dilingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang telah membantu mengisi kuesioner.
8. Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan materil dan moril serta semangat yang tiada hentinya memberikan semangat selama penulis melakukan perkuliahan, melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih sebesar-besarnya telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Makassar, April 2023

Penulis
Nirwana Fatimah Azzahra

ABSTRAK

NIRWANA FATIMAH AZZAHRA. *Survei Kecenderungan Pemilih Pemula Terhadap Strategi Komunikasi Politik Calon Presiden Tahun 2024 (Studi Kasus Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin)*. (Dibimbing oleh Moeh Iqbal Sultan dan Muhammad Akbar).

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Kecenderungan pemilih pemula dalam memilih calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, (2) Faktor faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih calon presiden tahun 2024, (3) Presepsi pemilih pemula terhadap strategi komunikasi yang cocok digunakan oleh parpol dalam memenangkan pasangan calon presiden Republik Indonesia 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin angkatan 2020-2022 dengan menggunakan tabel isaac dan michael maka ditentukan jumlah sampel sebanyak 292. Dengan Kriteria : (1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk, (2) Berusia 17-21 tahun, (3) Belum pernah mengikuti pemilihan presiden sebelumnya. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, tinjauan pustaka dan data sekundernya dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan pihak-pihak Mahasiswa yang terkait dengan penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel silang dan dianalisis secara kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan pemilih pemula dalam memilih calon presiden 2024 dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni melalui visi dan misi yang relevan dengan kawula muda, keberhasilannya dalam memimpin suatu kelompok atau organisasi sebelumnya, penggunaan platform media sosial sebagai wadah kampanye secara online, serta *personal branding* yang dibangun oleh masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih calon presiden RI tahun 2024 didasari dari faktor karakter kepemimpinan yang diinginkan dan disukai oleh anak muda, kemampuan inovatifnya untuk membuat program dan kebijakan, visi dan misi yang ditawarkan yang dapat membuat Indonesia menuju kearah yang lebih maju di masa mendatang, berani dan tegas dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan, figur yang dinilai merakyat, jujur dan sederhana, sikap politik rakyat yang menginginkan perubahan Indonesia di masa akan datang, popularitas dan kecerdasan, kemampuan intelektual dan rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Selanjutnya strategi komunikasi politik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan sejumlah media sosial secara *online* seperti *facebook*, *whatsapp*, dan *akun tiwitternya*, menggunakan media elektronik seperti TV, radio, serta melakukan pendekatan masyarakat atau tokoh agama.

Kata kunci : Pemilih pemula, strategi komunikasi politik dan capres

ABSTRACT

NIRWANA FATIMAH AZZAHRA. Beginner Voter Tendency Survey on the Political Communication Strategy of the 2024 Presidential Candidates (Case Study of Hasanuddin University Social Sciences Students). (Supervised by M. Iqbal Sultan and Muhammad Akbar).

The objectives of this research are: (1) The tendency of first-time voters to choose the presidential candidate for the Republic of Indonesia in 2024, (2) Factors that influence first-time voters in choosing the presidential candidate in 2024, (3) The communication strategy used by political parties in winning the presidential candidate pair Republic of Indonesia 2024.

This research was conducted at the Faculty of Social and Political Sciences. The population of this research is Hasanuddin University Social Sciences students class 2020-2022 using the isaac and michael tables, the total sample is determined as 292. With the following criteria: (1) Having an identity card, (2) 17-21 years old, (3) not yet have contested presidential elections before.

This type of research is descriptive analysis. Primary data was collected using observation, interviews, questionnaires, literature review and secondary data was collected by distributing questionnaires with student parties related to research. The collected data are then presented in the form of frequency tables and cross tables and analyzed quantitatively descriptively.

The results of the study show that the tendency of novice voters to choose the 2024 presidential candidate is influenced by several aspects, namely through the vision and mission that are relevant to young people, their success in leading a group or organization previously, the use of social media platforms as a platform for online campaigns, as well as strong personal branding. built by the community. Then the factors that influence novice voters in choosing a presidential candidate for the Republic of Indonesia in 2024 are based on the leadership character factors desired and liked by young people, their innovative ability to create programs and policies, the vision and mission offered which can make Indonesia move towards a more advanced future. future, courageous and firm in making every decision and policy, a figure who is considered by the people, honest and simple, the political attitude of the people who want changes in Indonesia in the future, popularity and intelligence, intellectual ability and a good track record in the eyes of society. Furthermore, the political communication strategy used is to utilize a number of online social media such as Facebook, WhatsApp, and their Twitter accounts, using electronic media such as TV, radio, and approaching the community or religious leaders.

Keywords: Beginner voters, political communication strategies and presidential candidates

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Definisi Operasional	11
F. Metode Penelitian	11
1. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
2. Tipe Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	12

4. Teknik Penentuan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Konsep Dasar Komunikasi.....	18
1. Pengertian Komunikasi.....	18
2. Unsur-Unsur Komunikasi.....	21
B. Strategi Komunikasi Politik	23
1. Pengertian Komunikasi Politik	23
2. Strategi Komunikasi Politik.....	26
3. Fungsi Komunikasi Politik	31
C. Partisipasi Politik	35
D. Pemilihan Umum	38
E. Pemilih Pemula.....	42
1. Pengertian Pemilih Pemula.....	42
2. Kecenderungan Pemilih Pemula	46
F. Pemilihan Calon Presiden	49
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin	52
B. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.....	59
C. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	61
B. Pembahasan	92
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020 – 2022	15
2. Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi Tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, 10%.....	16
3. Deskripsi Responden berdasarkan Program Studi pada Fisip Universitas Hasanuddin	63
4. Deskripsi responden berdasarkan angkatan pada Fisip Universitas Hasanuddin	64
5. Persepsi responden mengenai kecenderungan pemula dalam memilih calon presiden RI 2024	69
6. Frekwensi jawaban responden mengenai faktor yang mempengaruhi pemilih pemula memilih calon presiden RI Tahun 2024	78
7. Hasil tabulasi jawaban responden mengenai strategi komunikasi politik dalam pemenangan calon presiden RI 2024.....	87

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Survei Litbang Kompas Terkait Bakal Calon Presiden 2024 per Oktober 2022	4
2. Kerangka Konseptual	10
3. Struktur Organisasi FISIP Universitas Hasanuddin	60
4. Pilihan Calon presiden RI 2024 berdasarkan Usia memilih Pemula	67

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Kuesioner	110
2. Rekap Jawaban Responden	116
3. Rekap Jawaban Responden Kecenderungan Pemilih Pemula dalam Memilih Calon Presiden Republik Indonesia 2024	123
4. Rekap Jawaban Reponden Faktor yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Memilih Calon Presiden Republik Indonesia 2024	131
5. Rekap Jawaban Responden Strategi Komunikasi Politik	139
6. Hasil olahan data SPSS	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan negara yang demokrasi, berhubungan erat dengan pemilu alasannya karena merupakan indikator keberhasilan bagi suatu negara dalam melaksanakan demokrasi. Upaya untuk mewujudkan negara yang demokratis, maka perlu adanya pemilu yakni merupakan suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi suatu negara. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 menjelaskan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, presiden, wakil presiden dan memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu fungsi dan peran pemilihan umum adalah mewujudkan peralihan pemerintahan secara tertib dan damai selain itu juga dapat memobilisasi, menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, dimana salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu adalah memilih presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara

demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas luasnya menurut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

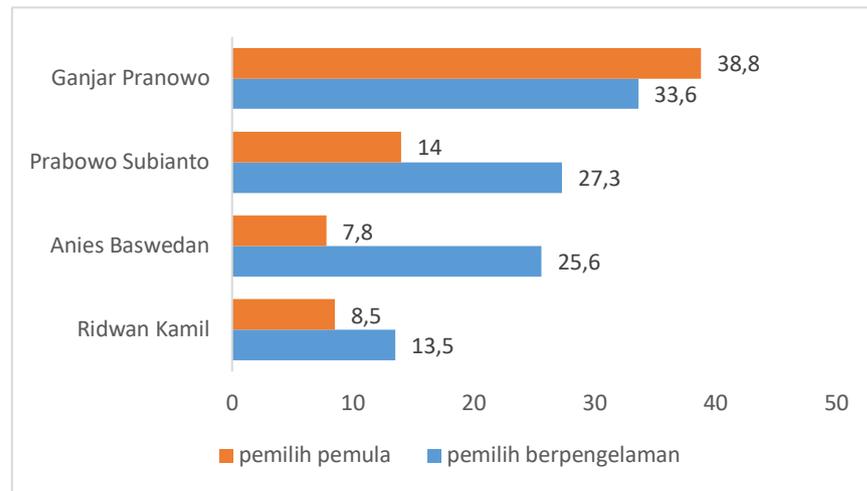
Upaya Penyelenggaraan pemilu, suara masyarakat berperan penting dalam menentukan langkah pemerintahan yang juga tidak terkecuali bagi generasi muda, termasuk dalam kategori pemilih pemula. KPU Pusat yang mengacu pada data keseluruhan wajib pemilih di seluruh Indonesia yakni sebanyak 192.770.611 pemilih sebesar 70-80 juta jiwa yang diantaranya adalah pemilih pemula. Hasil survey yang telah dilakukan yaitu bahwa generasi saat ini diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024, dimana data yang terkait dengan pemilih pemula yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan per 30 september 2022 tercatat sebesar 953.554 pemilih dan 40.070 diantaranya merupakan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah calon pemilih pertama kali menggunakan hak pilihnya dimana pada tgl 14 Pebruari 2024 berusia 17-21 tahun dan telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Masalah pemilih pemula umumnya belum memiliki pengalaman politik yang cukup dan keterikatan pada partai politik, masih *labil* dan *apati* untuk menentukan pilihannya. Pengetahuan politik terhadap pemilih pemula merupakan hal yang sangat penting agar pemilih pemula tidak hanya dijadikan sebagai obyek politik saja, sehingga menimbulkan kesan adanya tekanan dan manipulasi dalam menentukan pilihannya untuk yang akan datang, pemilih pemula tidak hanya dijadikan obyek politik saja yang muda dimana tidak memihak pada salah satu kandidat saja yang akan menimbulkan kesan adanya

tekanan dan manipulasi untuk menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin negara yang akan datang. Pemilih pemula diharapkan akan mampu leih cermat, kritis dan rasional dalam memilih dengan hati nurani tanpa ada arahan dan paksaan dari orang lain.

Kecenderungan politik pemilih pemula terbentuk dari proses yang panjang, alasannya karena pemilih pemula sangat akrab dengan dunia digital dan juga merupakan pengguna aktif media sosial memiliki pola pikir yang sangat terbuka terhadap gagasan yang disampaikan melalui media. Saat ini menunjukkan bahwa sudah mulai bermunculan kampanye-kampanye secara *online* melalui *platform digital* seperti *Tiktok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter* dll yang digunakan oleh bakal calon presiden hingga partai politik, agar dapat menjangkau para pemilih terutama bagi pemilih pemula yang bermain di *platform digital* tersebut dengan harapan dapat menjadi jembatan penghubung pada pemilu yang akan digelar di tahun 2024. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh bakal calon presiden dalam melakukan komunikasi secara *persuasive* dengan menyampaikan informasi atau pesan politik yang dikemas dengan bahasa kekinian yang *kreatif, komunikatif*, dan syarat dengan nilai – nilai emosional guna memperoleh suara dari partisipasi pemilih pemula.

Menurut data survey yang dilakukan oleh litbang Kompas terkait dengan bakal calon presiden tahun 2024 dimana ada 5 yang diunggulkan untuk dipilih menjadi presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Survei Litbang Kompas Terkait Bakal Calon Presiden 2024 Per Oktober 2022

Gambar 1 yakni survei Litbang “Kompas” terkait dengan simulasi bakal calon presiden 2024 yang menunjukkan bahwa dari hasil survei yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan mengenai kecenderungan pemilih pemula dalam menentukan calon presiden 2024 antara pemilih yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dengan pemilih pemula. Pendapat yang dikemukakan oleh Meliala (2020) yang mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan referensi untuk memilih seorang kandidat atau kontestan yakni program atau kebijakan publik yang ditawarkan dan diperjuangkan oleh presiden apabila ingin memenangkan hati rakyat dalam pemilu, citra sosial calon presiden, perasaan emosional yakni dimensi emosional yang nampak dari seorang calon presiden, citra calon presiden yakni berkaitan dengan sifat sifat khusus yang melekat pada seorang calon presiden dan membedakannya dengan calon presiden yang lain.

Kemudian dalam melakukan survei yakni terkait dengan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kecenderungan pemilih pemula memilih salah satu

calon presiden yang diusung oleh partai politik maka *grand theory* yang digunakan adalah *individual differences theory of mass communication effect*. Dalam teori ini menjelaskan bahwa individu individu sebagai anggota khalayak sasaran media massa secara selektif menaruh perhatian kepada pesan pesan terutama jika berkaitan dengan kepentingannya, konsisten dengan sikap sikapnya sesuai dengan kepercayaannya yang didukung oleh nilai nilainya.

Penelitian ini didasari dari hasil peneliti sebelumnya yakni dilakukan oleh Riskiyani *et al.*, (2019). Dalam penelitian tersebut yang mengamati mengenai bagaimana kecenderungan pemilih pemula yang dalam hal ini siswa kelas XII SMA Negeri 1 Way Jepara setelah melihat hastage 2019 ganti presiden. Dapat dilihat dari penelitian di atas, persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu objek penelitian yaitu kecenderungan pemilih pemula. Untuk perbedaannya yaitu pada penelitian di atas lebih fokus membahas pengaruh pada pemberitan media massa dengan hastag 2019 ganti presiden sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti lebih general membahas apa saja hal hal yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih pemula hingga cenderung memilih salah satu calon presiden dan selain itu dapat mengamati strategi komunikasi politik yang digunakan parpol dalam memenangkan salah satu kandidat yang diusung.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hal ini yang menjadi alasan peneliti tertarik memilih judul penelitian yakni : “ **Survei Kecenderungan Pemilih Pemula Terhadap Strategi Komunikasi Politik Calon Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (Studi Kasus Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah berupa pertanyaan dasar pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kecenderungan pemilih pemula dalam memilih calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih calon presiden Republik Indonesia 2024 ?
3. Persepsi pemilih pemula terhadap strategi komunikasi politik bagaimana yang cocok digunakan parpol dalam memenangkan calon presiden Republik Indonesia 2024 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui :

- a) Kecenderungan pemilih pemula dalam memilih calon presiden Republik Indonesia tahun 2024
- b) Faktor faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih calon presiden tahun 2024
- c) Persepsi pemilih pemula terhadap strategi komunikasi yang cocok digunakan oleh parpol dalam memenangkan calon presiden Republik Indonesia 2024

2. Kegunaan Penelitian

Kemudian kegunaan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

a) Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambah khasanah pengetahuan, dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai teori, konsep dan praktek di setiap kalangan khususnya pemilih pemula dan partai politik dan selain itu dapat dijadikan referensi sebagai bahan perbandingan untuk peneliti yang akan datang.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan masukan serta rekomendasi bagi para partai politik sehingga dapat menarik minat pemilih pemula untuk memilih calon presiden Republik Indonesia tahun 2024.

D. Kerangka Konseptual

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya guna memilih wakil rakyat. Menurut Andrew Reynolds dalam Labolo (2015:51) pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dijelaskan bahwa “Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum serentak yang terjadi setiap 5 (lima) tahun sekali akan berlangsung kembali pada tahun 2024. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat lainnya akan di selenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.

2. Pemilih Pemula

Pemilih di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih rasional yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan pemilihan dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih (Yuningsih & Warsono, 2014).

Pengertian pemilih pemula berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV pasal 198 ayat 1 menyebutkan

pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang mempunyai hak memilih.

Kelompok pemilih pemula ini rata-rata berstatus pelajar tingkat akhir, mahasiswa tingkat awal serta pekerja muda dengan rentang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini menjadi salah satu objek incaran para kontestan pemilu pada saat pesta rakyat akan berlangsung. Karena mereka masih sangat awam dan sangat memerlukan pembinaan serta arahan terkait kesadaran politik dalam menentukan pilihannya untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang terjadi di Indonesia.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas terkait perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, dan membuat pengaruh atau efek terhadap perilaku politik. Dapat kita simpulkan bahwa Komunikasi politik biasanya dikaitkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik untuk menciptakan pemahaman makna atau efek yang sama (Cangara, 2016).

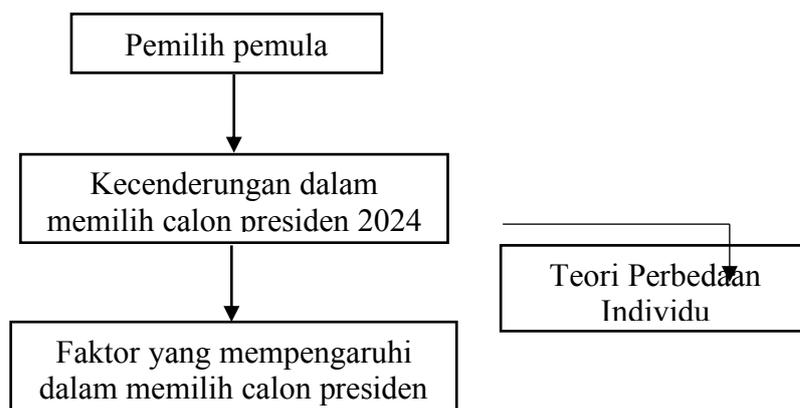
Menurut Nimmo (2005) komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Sementara itu, menurut Alwi Dahlan yang dikutip Cangara (2016) komunikasi politik merupakan suatu bidang atau disiplin yang

menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat atau berpengaruh terhadap perilaku politik.

Dalam studi komunikasi politik, terdapat beberapa komponen yang menyangkut (1) komunikator politik, (2) pesan politik, (3) media yang digunakan dalam komunikasi politik, (4) khalayak komunikasi politik, dan (5) akibat atau efek yang ditimbulkan dalam politik. Dalam hal ini bukan hanya bakal calon presiden saja yang dapat menjadi komunikator politik melainkan mereka yang dapat menyampaikan informasi terkait hal-hal yang mengandung makna politik kepada khalayak, dan menghasilkan efek yaitu memutuskan untuk memilih satu calon presiden (Nimmo, 2006).

4. Teori Perbedaan Individu

Teori yang dikemukakan oleh Melvin D Defleur ini adalah “*Individual Differences Theory of Mass Communication Effect*”. Teori ini menelaah perbedaan-perbedaan individu sebagai sarana media massa ketika mereka diterpa sehingga dapat menimbulkan efek tertentu yang berbeda-beda. Menurut teori ini, individu-individu sebagai anggota khalayak sasaran media massa secara selektif, menaruh perhatian kepada pesan-pesan terutama jika berkaitan dengan kepentingannya, konsisten dengan sikap-sikapnya, sesuai dengan kepercayaannya yang didukung oleh nilai-nilainya.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

E. Definisi Operasional

Variabel merupakan konsep dalam bentuk konkret atau konsep operasional, yaitu dapat langsung diukur. Variabel adalah bagian empiris dari sebuah konsep. Variabel memiliki fungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dan dunia empiris. Proses untuk mengubah konsep (konstruk) menjadi variabel ada pada tahap operasionalisasi konsep (definisi operasional). Definisi operasional variabel merupakan fenomena dan peristiwa yang dapat diukur atau dimanipulasi dalam proses riset. Variabel dapat mempunyai lebih dari satu nilai dalam kontinum tertentu. Definisi operasional digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengukur batasan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pemilih pemula yang dimaksud adalah Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin angkatan 2020-2022 berusia 17-21 tahun yang baru pertama kali akan melakukan pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024.
2. Calon presiden tahun 2024 yang dimaksud adalah 4 nama bakal calon dengan jumlah voting tertinggi berdasarkan survei litbang Kompas Oktober 2022.
3. Teori perbedaan individu atau *Individual Differences Theory of Mass Communication Effect* yang dikemukakan oleh Melvin D. DeFleur, teori ini mengemukakan tentang perbedaan individu jika diterapkan oleh sebuah informasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian seperti yang diuraikan dibawah ini :

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 bulan yaitu pada bulan Desember 2022-Januari 2023. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10, Kelurahan. Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tipe Penelitian

a. Berdasarkan paradigma

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui teknik survei dengan menggunakan angket (kuesioner).

b. Berdasarkan tujuan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif., yaitu menjelaskan atau menggambarkan dari data yang telah terkumpul dari jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden dengan menggunakan angket (kuesioner) yang akan dibagikan dengan memberi sejumlah pertanyaan dalam bentuk pernyataan yang telah tertulis dalam kuesioner (Sugiyono, 2019).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui studi kepustakaan dengan mencari buku-buku, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diangkat sebagai pendukung data primer yang telah diperoleh (Sugiyono, 2019).

b. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai Suvei Kecenderungan Pemilih Pemula Terhadap Strategi Komunikasi Politik Calon Presiden Republik Indonesia Tahun 2024.

2) Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.

3) Kuesioner (Angket)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dalam bentuk pernyataan menggunakan angket (kuesioner) yang akan dibagikan ke beberapa responden. Kuesioner tersebut digunakan sebagai bahan untuk memperoleh informasi dari responden terhadap kecenderungan pemilih pemula untuk Calon Presiden RI tahun 2024. Berikut tahapan dalam pembuatan kuesioner:

- a. Menentukan kisi-kisi angket
- b. Menentukan jumlah butir angket
- c. Menentukan tipe angket
- d. Menentukan skor item angket

Pada angket penelitian, diberi alternatif jawaban Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Dalam hal ini ada lima klasifikasi jawaban yang diberikan dengan kemungkinan pemberian skor sebagai berikut:

1. Jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 5
2. Jawaban Sesuai (S) diberi nilai 4
3. Jawaban Netral (N) diberi nilai 3
4. Jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 2
5. Jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 1.

4) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan,

dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis.

4. Teknik Penentuan Data

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Maka dari itu, populasi yang dimaksud adalah mahasiswa aktif program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin angkatan 2020-2022.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020-2022

No.	Program Studi	Jumlah Mahasiswa Aktif Angkatan 2020-2022
1	Ilmu Komunikasi	319
2	Ilmu Hubungan Internasional	393
3	Ilmu Politik	209
4	Ilmu Pemerintahan	203
5	Ilmu Administrasi Negara	284
6	Sosiologi	202
7	Antropologi	149
Jumlah		1.759

Sumber : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas

Dari data jumlah Mahasiswa Aktif pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020-2022 yakni sebanyak 1.759 orang, karena populasi cenderung berjumlah besar, sangat tidak mudah bagi peneliti untuk meneliti tiap individu satu per satu dalam populasi, maka dengan alasan ini peneliti harus mengambil sampel.

b. Sampel

Sampel adalah sejumlah individu yang dipilih dari populasi, dan dimaksudkan untuk mewakili populasi. Sampel juga bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara *Purposive saming* dengan metode yang digunakan yaitu *Simple Random Sampling*. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk
- c. Belum pernah mengikuti pemilihan presiden sebelumnya

Untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan, maka digunakan tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5% sehingga ditemukan jumlah sampel sebesar 292 orang.

Tabel 2. Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi Tertentu Yang Dikembangkan dari Isaac dan Michael Untuk Tingkat Kesalahan 1%, 5%, 10%

N	S			N	S			N	S		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
10	10	10	10	280	197	155	138	2800	537	310	247
15	15	14	14	290	202	158	140	3000	543	312	248
20	19	19	19	300	207	161	143	3500	558	316	251
25	24	23	23	320	216	167	147	4000	569	320	254
30	29	28	27	340	225	172	151	4500	578	323	255
35	33	32	31	360	234	177	157	5000	586	326	257
40	38	36	35	380	242	182	158	6000	598	329	259
45	42	40	39	400	250	186	162	7000	606	332	261
50	47	44	42	420	257	191	165	8000	613	334	263
55	51	48	46	440	265	195	168	9000	618	335	263
60	55	51	49	460	272	198	171	10000	622	336	263
65	59	55	53	480	279	202	173	15000	635	340	266
70	63	58	56	500	285	205	176	20000	642	342	267

N	S			N	S			N	S		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
75	67	62	59	550	301	213	182	30000	649	344	268
80	71	65	62	600	315	221	187	40000	563	345	269
85	75	68	65	650	329	227	191	50000	655	346	270
90	79	72	68	700	341	233	195	75000	658	346	270
95	83	75	71	750	352	238	199	100000	659	347	270
100	87	78	73	800	363	243	202	150000	661	347	270
110	94	84	78	850	373	247	205	200000	661	347	270
120	102	89	83	900	382	251	208	250000	662	348	270
130	109	95	88	950	391	255	211	300000	662	348	270
140	116	100	92	1000	399	258	213	350000	662	348	270
150	122	105	97	1100	414	265	217	400000	662	348	270
160	129	110	101	1200	427	270	221	450000	663	348	270
170	135	114	105	1300	440	275	224	500000	663	348	270
180	142	119	108	1400	450	279	227	550000	663	348	270
190	148	123	112	1500	460	283	229	600000	663	348	270
200	154	127	115	1600	469	286	232	650000	663	348	270
210	160	131	118	1700	477	289	234	700000	663	348	270
220	165	135	122	1800	485	292	235	750000	663	348	271
230	171	139	125	1900	492	294	237	800000	663	348	271
240	176	142	127	2000	498	297	238	850000	663	348	271
250	182	146	130	2200	510	301	241	900000	663	348	271
260	187	149	133	2400	520	304	243	950000	663	348	271
270	192	152	135	2600	529	307	245	1000000	664	349	272

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang menguraikan dan menggambarkan Kecenderungan Pemilih Pemula dalam hal ini adalah Mahasiswa FISIP Universitas Hasanuddin Makassar dalam memilih calon Presiden (CAPRES) RI Tahun 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Konsep Dasar Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi secara etimologis sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *communication*. *Communication* sendiri berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti “sama atau sama makna”, *communico* atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*) (siapa). Istilah pertama (*communis*) adalah istilah yang paling banyak digunakan sebagai asal-usul dari kata komunikasi. Komunikasi merupakan proses berbagi makna dalam bentuk pesan komunikasi antara pelaku komunikasi. Pesan komunikasi bisa berupa gagasan atau ide pikiran yang diwujudkan dengan simbol yang mengandung makna dan dianut secara sama oleh pelaku komunikasi.

Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada satu definisi yang tunggal atau hanya satu definisi komunikasi yang benar. Setiap pakar memberikan definisi tersendiri sesuai dengan kepakarannya masing-masing, karena itu definisi komunikasi sangat beragam dan banyak sekali. Banyaknya definisi tentang komunikasi menunjukkan betapa luasnya dan beragamnya pengertian dari komunikasi yang dapat dilihat dari berbagai aspek, karena itu definisi tentang komunikasi dikemukakan oleh berbagai pakar ilmu dari dari berbagai disiplin ilmu. Lebih luas komunikasi dapat dilakukan oleh semua

mahluk hidup ciptaan tuhan, termasuk hewan dan mahluk halus seperti halnya bangsa jin.

Pengertian komunikasi menurut (Hariyanto, 2021:16) adalah sebagai berikut :

Komunikasi didefinisikan secara luas sebagai berbagi pengalaman". Sampai batas tertentu, setiap makhluk dapat dikatakan melakukan komunikasi dalam pengertian berbagi pengalaman. Komunikasi adalah penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan (*source*, komunikator sender) dtujukan kepada penerima pesan (*receiver*) *communicant, audience*

Milyane (2022:4) mendefinisikan komunikasi sebagai berikut :

Komunikasi adalah sebagai proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih. Definisi ini menunjukkan bahwa sebafei proses penciptaan makna, maka harus ada yang dipertukarkan dalam komunikasi ini, yaitu pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator secara bergantian ini harus memiliki kesamaan makna terhadap sesuatu sehingga mereka saling paham terhadap pesan tersebut. Artinya, saat komunikasi terjadi, masing-masing mengetahui pesan tersebut, memprosesnya dalam cara berpikir dan sampai pada kemengertian yang sama terhadap pesan tersebut.

Menurut Mas dan Haris (2020:9) komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan (ada tahapan atau sekuensi) serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu.
- b. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya.

- c. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang terlibat kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan.
- d. Komunikasi bersifat simbolis Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka atau tanda-tanda lainnya.
- e. Komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau parsial.
- f. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Maksudnya adalah bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti telepon, internet, faximili, dan lain-lain, faktor ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi.

Komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya (Karyaningsih, 2018:4).

2. Unsur-Unsur Komunikasi

Komunikasi sering dihubungkan dengan kata Latin *communis* yang artinya sama. Komunikasi hanya terjadi bila kita memiliki makna yang sama. Pada gilirannya, makna yang sama hanya terbentuk bila kita memiliki pengalaman yang sama. Kesamaan makna karena kesamaan pengalaman masa lalu atau kesamaan struktur kognitif disebut isomorfisme. Isomorfisme terjadi bila komunikan-komunikan berasal dari budaya yang sama, status sosial yang sama, pendidikan yang sama, ideologi yang sama; pendeknya mempunyai sejumlah maksimal pengalaman yang sama. Pada kenyataannya tidak ada isomorfisme total.

Percampuran adukkan fakta, penafsiran, dan penilaian. Dalam berbahasa kita sering mencampuradukkan fakta (uraian), penafsiran (dugaan), dan penilaian. Masalah ini berkaitan dengan dengan kekeliruan persepsi. Contoh: apa yang ada dalam pikiran kita ketika melihat seorang pria dewasa sedang membelah kayu pada hari kerja pukul 10.00 pagi? Kebanyakan dari kita akan menyebut orang itu sedang bekerja. Akan tetapi, jawaban sesungguhnya bergantung pada: Pertama, apa yang dimaksud bekerja? Kedua, apa pekerjaan tetap orang itu untuk mencari nafkah? Bila yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan tetap untuk mencari nafkah, maka orang itu memang sedang bekerja. Akan tetapi, bila pekerjaan tetap orang itu adalah sebagai dosen, yang pekerjaannya adalah membaca, berbicara, menulis, maka membelah kayu bakar dapat kita anggap bersantai baginya, sebagai selingan di antara jam-jam kerjanya.

Agar sebuah proses komunikasi menjadi efektif, diperlukan unsur-unsur yang paling mendasar sebagai persyaratan terjadinya komunikasi. Terdapat tiga unsur yang paling mutlak yang harus dipenuhi dalam proses komunikasi, menurut (Purba *et al.*, 2021:8) yaitu :

- (a) Komunikator; manusia yang menyatakan pesan kepada komunikan yang dapat berupa individu atau kelompok;
- (b) Komunikan; manusia yang menerima pesan dari komunikator; dan
- (c) Saluran/Media; jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikan yang digunakan oleh pengirim pesan. Setiap unsur tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait satu dan lainnya yang dapat menentukan kesuksesan dari sebuah komunikasi.

Proses komunikasi dapat diterangkan dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak digunakan adalah dengan menyajikan unsur-unsur komunikasi. Menurut Panuju (2018:39), ada beberapa unsur komunikasi yang selalu terlibat dalam komunikasi, yakni:

1. Komunikator. Komunikator adalah mengirim atau penyampai pesan.
2. Pesan (*Message*). Merupakan sesuatu, entah dalam bentuk ide, abstraksi realitas atau bahkan hal yang bersifat ekspektasi (harapan) yang disampaikan oleh komunikator ke pada penerima.
3. Saluran (*Source*). Merupakan sarana atau media yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan.
4. Komunikan (penerima). Merupakan penerima pesan, baik bersifat individual, kelompok, massa, maupun anggota organisasi.
5. Hambatan atau gangguan. Dalam setiap komunikasi pasti ada faktor yang menyebabkan proses komunikasi tidak berjalan efektif, tidak seperti

yang diinginkan, dan bahkan acap kali menimbulkan salah pengertian. Gangguan bisa berasal dari komunikator, isi pesan, media yang digunakan, maupun pada penerimanya.

6. Umpan balik (*feedback*). Merupakan respons, tanggapan, ataupun reaksi atas suatu pesan. Umpan balik bisa dalam bentuk yang netral, ada yang mendukung (positif), dan ada yang menolak (negatif).
7. Efek. Merupakan akibat yang timbul dari komunikasi, baik berupa emosi, pikiran maupun perilaku.
8. Situasi. Merupakan keadaan yang ada atau terjadi pada saat berlangsung komunikasi. Situasi ini bisa berupa suhu, cuaca, tata ruang, sikap peserta komunikasi, dan tujuan tujuan berkomunikasi.
9. Selektivitas. Merupakan filter yang digunakan peserta komunikasi untuk menyaring pesan. Baik berupa nilai-nilai budaya, mitos, prasangka, dan lainnya.
10. Lingkungan. Merupakan pihak lain yang ikut campur atau intervensi dalam komunikasi.

Jadi setiap unsur (komponen) komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi, bahkan unsur-unsur tersebut saling bergantung satu sama lainnya, artinya tanpa keikutsertaan satu unsur akan mempengaruhi jalannya komunikasi.

C. Strategi Komunikasi Politik

1. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi merupakan bagian yang paling penting dari semua sistem sosial di dalam masyarakat manusia, termasuk juga adalah politik. Dalam

komunikasi politik fakta-fakta sosial selalu dihubungkan dengan peristiwa dan waktu dimana fakta sosial itu terjadi, pemahaman ini disingkat dengan istilah momentum. Momentum adalah sebuah konstruksi sosial dimana terjadi secara kebetulan kemudian direkayasa sebagai momentum atau suatu realitas yang dikonstruksi untuk menciptakan suatu kondisi yang dicitrakan untuk memberi kesan tertentu kepada masyarakat khalayak atau lawan-lawan politik. Diantara keduanya ini yang paling penting adalah sebuah penggambaran (*picture*) realitas sosial-politik yang bermakna dan dapat disampaikan kepada publik. Persoalannya kemudian menjadi melebar karena teks penggambaran (*picture*) itu ketika melalui proses publisitas, maka menjadi sesuatu yang terlepas dari konteksnya.

Komunikasi politik menurut Muhazir, (2021:5) adalah :

Komunikasi politik adalah segala bentuk pertukaran simbol-simbol atau pesan-pesan yang setidaknya sampai tingkat tertentu, dipengaruhi oleh, atau juga berpengaruh terhadap berfungsinya sistem politik. Definisi ini memberikan penekanan kepada hubungan timbal-balik antara komunikasi di satu sisi dengan sistem politik di sisi lain: bahwa komunikasi politik juga dipengaruhi sistem politik. Sistem politik sebagai sistem yang dimiliki komponen-komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain terkait dengan kekuasaan dan kewenangan penjabatan sumber daya untuk maksud pengambilan keputusan-keputusan.

Menurut Sarihati *et al.*, (2022:7) komunikasi politik mengandung dua pengertian yang saling menyatu yaitu :

Komunikasi adalah objek formalnya, sementara politik adalah objek materialnya. Artinya kajian dasarnya adalah tentang komunikasi dan ilustrasinya berkaitan dengan masalah politik. Pada hakikatnya komunikasi adalah penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan, baik verbal maupun nonverbal. Sedangkan politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri.

Komunikasi politik secara keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa menghubungkannya dengan dimensi politik dan semua aspek dan permasalahannya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang untuk kompleksitas realitas sehari-hari. Bahkan jika komunikasi dipahami hanya sebagai 'proses penyampaian pesan', masalahnya akan terus muncul, apakah itu "proses transmisi pesan politik".

Menurut Alfikri, (2022:7) Komunikasi politik adalah :

Komunikasi politik adalah komunikasi untuk tujuan mempengaruhi, sehingga masalah-masalah yang dihadapinya dapat mengikat seluruh warganya pada sanksi yang ditetapkan secara kolektif oleh lembaga-lembaga politik. Komunikasi politik adalah suatu proses dimana informasi politik yang relevan diidentifikasi dari satu bagian sistem politik ke bagian lain dan antara sistem sosial dan sistem politik.

Komunikasi politik mengkhususkan diri dalam hal penyampaian informasi politik. Komunikasi politik sangat penting dalam sistem politik. Komunikasi politik menempati posisi yang strategis. Komunikasi politik dinyatakan sebagai “urat nadi” proses politik. Karena aneka struktur politik seperti parlemen, kepresidenan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warganegara dapat memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik ini. Komunikasi politik didefinisikan sebagai komunikasi yang ditujukan tentang politik (Qadaruddin, 2016:4).

Komunikasi politik menjalankan peranan sangat penting dan strategis didalam perpolitikan Indonesia, terutama dalam menentukan elemen dinamis dan menjadi bagian menentukan dalam sosialisasi politik, partisipasi politik,

dan perekrutan politik. Hal ini sama halnya dengan aktivitas politik individu sangat ditentukan oleh komunikasi politik.

Dengan komunikasi politik tersebut maka hubungan antara komunikasi dan politik sangat terlihat menjadi suatu bidang kajian tersendiri. Dimana dalam menjalankan fungsi komunikasi tersebut sangat dibutuhkan media atau sarana yang sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat dan masif. Disinilah terlihat peranan media massa atau media sosial dalam menjalankan fungsi komunikasi yang sangat menentukan terhadap berfungsinya aktivitas-aktivitas politik lainnya seperti: sosialisasi politik, rekrutmen politik, agregasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik (Harnawansyah, 2020:167).

2. Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi ialah sesuatu konsep yang banyak diadopsi dari bermacam ilmu ekonomi, politik ataupun bisa ditemui pada gelar angkatan bersenjata dalam peperangan, tetapi tutur "strategi" merujuk pada bagian ataupun faktor dalam komunikasi yang amat khusus bersumber pada kondisi yang dialami buat memperoleh kesuksesan ataupun efektifitas komunikasi.

Ravyansah *et al.*, (2022:81). mengemukakan definisi strategi komunikasi politik sebagai berikut :

Didalam strategi komunikasi politik terdapat pemrograman, siasat, identifikasi lapangan (*fact finding*), kalkulasi area atau ilmu lingkungan komunikasi, penerapan hingga pada sasaran target. Dengan begitu strategi komunikasi dalam satu kondisi ataupun suatu suasana, tidak akan serupa yang bisa diaplikasikan dalam kondisi lain. Tetapi kedudukan serta kegunaan strategi komunikasi dalam suatu badan ataupun kegiatan komunikasi amat berarti buat memperoleh tujuan yang diharapkan.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, diperlukan strategi komunikasi politik yang baik dan menarik. Dalam penyampaian komunikasi politik harus bersifat persuasif dan positif. Dibutuhkan perencanaan yang matang dalam penyampaian pesan politik tersebut. Untuk penyebarannya, dibutuhkan para komunikator politik yang mempunyai kemampuan yang baik dalam berbicara agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami, sehingga dapat memperoleh respon yang baik dan positif dari masyarakat.

Strategi komunikasi politik merupakan rencana yang meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran (Basri, 2021).

Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Menurut Andra (2023:49) model strategi komunikasi politik adalah sebagai berikut:

1) Ketokohan dan Lembaga

Dalam komunikasi politik, yang paling berpengaruh bukan hanya isi pesan politik, tapi juga akan dilihat siapa komunikatornya (tokoh politik, aktivis maupun professional) dan dari lembaga mana komunikator tersebut. Dengan kata lain, ketokohan seseorang komunikator dan lembaga yang mendukung komunikator tersebut sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Komunikasi politik dalam bentuk tertentu seperti retorika atau pidato politik, khalayak atau massa akan lebih memperhatikan siapa yang bicara bukan pada isi atau pesan yang disampaikan. Mereka akan lebih memperhatikan pesan yang disampaikan apabila komunikator atau penyampai pesan adalah tokoh yang mereka hormati dan segani. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan adalah faktor yang sangat signifikan dalam melakukan strategi komunikasi politik.

Citra diri komunikator politik dapat terbentuk melalui beberapa faktor, pertama, melalui pengalaman langsung yaitu melalui pergaulan dan aktivitas yang berlangsung antara komunikator politik tersebut dengan khalayaknya. Kedua, citra diri tokoh politik dapat juga terbentuk melalui pengalaman wakilan, yaitu mendengar melalui cerita banyak orang atau melalui media, seperti radio, koran, majalah, maupun televisi. Ketiga, citra diri komunikator politik juga dapat terbentuk melalui dukungan lembaga tempat ia berkiprah atau dukungan lembaga lain yang sudah memiliki nama atau citra yang baik. Oleh karena itu, memantapkan kelembagaan merupakan faktor yang sangat penting dalam komunikasi politik.

2) Menciptakan Kebersamaan

Strategi kedua yang harus dilakukan mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak, dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang homofilif, seperti persamaan busana, persamaan bahasa (simbol komunikasi), dan yang paling penting adalah persamaan kepentingan dengan khalayak.

Untuk bisa melakukan hal tersebut, komunikator politik harus terlebih dahulu mengenal, mengerti dan memahami daya tangkal dan daya serap khalayak, baik yang bersifat psikologis maupun bersifat sosio-kultural. Dengan demikian, langkah-langkah dalam menciptakan kebersamaan antara komunikator dengan khalayaknya adalah sebagai berikut:

a. Memahami khalayak

Untuk mengenal, mengetahui dan memahami kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan politik khalayak tersebut dapat dilakukan melalui orientasi, penjajakan, survey atau penelitian awal. Dalam penelitian, khalayak dapat dikategorikan dalam berbagai faktor. Misalnya, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai topik pesan yang akan disampaikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan atau status sosial. Selain melalui penelitian, pengenalan mengenai khalayak dapat juga dilakukan melalui pendugaan-pendugaan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan teoritis mengenai manusia, baik sebagai makhluk biologis maupun makhluk sosial.

b. Menyusun pesan persuasif

Dalam menyusun pesan politik yang bersifat persuasif, yang harus diperhatikan adalah menentukan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak, sehingga pesan tersebut mampu membangkitkan perhatian khalayak. Selanjutnya diharapkan dengan adanya perhatian khalayak terhadap pesan yang disampaikan akan menggerakkan khalayak tersebut untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh komunikator.

c. Menetapkan metode

Metode yang dimaksud disini adalah metode penyampaian dan metode menyusun isi pesan politik yang sesuai dengan keadaan khalyak, fasilitas dan biaya. Metode komunikais yang dapat diaplikasikan dalam komunikasi politik adalah metode informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalyak dengan cara memberikan penerangan. Selain itu dikenal juga metode adukatif atau metode mendidik, yaitu memberikan suatu gagasan kepada khalyak berdasarkan fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode lain yang dapat digunakan adalah metode persuasif, yaitu mempengaruhi khalyak dengan cara membujuk. Metode ini merupakan satu cara mempengaruhi khalyak dengan jalan tidak memberi kesempatan mereka untuk berfikir kritis, bahkan kalau perlu khalyak dapat dipengaruhi tanpa sadar. Ada pula metode kursif yang berarti mempengaruhi khalyak dengan cara memaksa. Metode ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan, perintah dan intimidasi yang untuk pelaksanaannya didukung oleh suatu kekuatan yang cukup tangguh.

d. Memilah dan memilih media

Penggunaan media dalam komunikasi politik, perlu dipilih dan dipilah dengan cermat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi khalyak, tidak lupa dengan memperhatikan sistem politik di suatu negara bangsa. Di negara demokrasi, politikus tidak mungkin mengendalikan atau

mengontrol media, bahkan sebaliknya media massa yang mengontrol kegiatan para politikus. Jadi seleksi penggunaan media politik dapat dilakukan hanya media yang dapat dikendalikan dan dikontrol oleh sang komunikator. Media yang dimaksud biasanya bukan media yang melembaga seperti media massa, tetapi media format kecil, seperti buku saku, bulletin, brosur, poster, folder, selebaran, spanduk atau baliho. Selain itu juga dapat digunakan media interaktif seperti internet.

3) Membangun Konsensus

Strategi ini adalah membangun konsensus baik antara politikus dan dalam satu partai maupun antar politikus dari partai yang berbeda. Dalam membangun konsensus, seorang politikus atau aktivis harus memiliki kemampuan berkompromi. Konsensus atau kesepakatan ini biasanya dapat dicapai setelah ada konflik atau perbedaan pendapat terhadap suatu masalah. Untuk membangun konsensus, harus dimulai dengan kesediaan membuka diri, sehingga dapat mengembangkan seni berkompromi.

3. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik diartikan sebagai komunikasi yang memiliki konsekuensi mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Konflik dimaksud bisa perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, dan perbedaan gagasan. Dalam manajemen konflik, semua perbedaan itu bisa menjadi khazanah perbendaharaan pemikiran apabila semua perbedaan itu terakomodasi, teradaptasi, dan teraktualisasi. Tidak ada yang merasa terkalahkan dan memenangkan “pertandingan”. Semua merasa pas dan puas

serta memperhatikan buah pikirannya. Selama pengelolaannya baik, selama itu pula berbagai kepentingan akan terasa enjoy di tengah keragaman

Komunikasi politik memberi ruang kepada setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya kepada para pemangku jabatan, baik kepada pemerintah maupun kepada para anggota parlemen. Komunikasi politik bisa lancar apabila setiap warga negara yang terlibat memahami benar persoalan yang dihadapi dan sekaligus mendapatkan perhatian pemerintah. Aspirasi warga negara yang cerdas dan perhatian pemerintah yang luas, bisa membuat hubungan yang akrab di antara sesama warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah. Komunikasi ini dapat pula mengungkap rupa-rupa hal yang tersembunyi. Di negara demokrasi, sejatinya komunikasi politik itu berlangsung tertib, tidak ada kendala. Namun praktiknya tidak semudah yang dilisankan, bergantung pada pemegang kendali kebijakan dan kekuasaan yang seringkali mengutak-atik makna demokrasi berdasarkan penafsiran subjektif dan kepentingan. Di Indonesia misalnya, budaya tenggang rasa, gotong royong, toleransi, dan solidaritas sosial yang menjadi tradisi nenek moyang, seperti hiasan indah pemoles wajah, padahal apabila tradisi ini dipelihara, diterapkan, dan mewarnai komunikasi politik, maka para politisi tentu dengan kesantunannya akan mengedepankan kepentingan publik, bahkan dengan jiwa besarnya berani mengambil risiko dengan mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri

sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat fungsi lainnya dijalankan. Berikut ini terdapat tujuh fungsi dari komunikasi politik menurut Muslimin (2020:29) antara lain :

a. Sosialisasi Politik (*Socialization Political*)

Suatu proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat tempat orang itu berada.

b. Rekrutmen Politik (*Recruitment*)

Merupakan fungsi penyeleksian untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Ada tiga tahapan, mempengaruhi orang lain untuk menjadi kader, membina loyalitas kader, dan memproyeksikan kader untuk terlibat dan intensif mewakili organisasi di dalam jabatan-jabatan politik.

c. Artikulasi Kepentingan (*Interest Articulation*)

Proses yang mengolah aspirasi masyarakat yang bercorak ragam yang disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan yang teratur.

d. Agregasi Kepentingan (*Interest Agregations*)

Merupakan fungsi yang menggabungkan berbagai kepentingan yang sama atau hampir sama untuk dituangkan dalam rumusan kebijaksanaan lebih lanjut dengan demikian agregasi kepentingan ini bukan lagi kepentingan orang per orang atau kelompok akan tetapi kepentingan masyarakat.

e. Pembuatan Aturan (*Rule Making*)

Merupakan fungsi yang dijalankan oleh lembaga legeslatif. Untuk menjalankan fungsi ini legislatif dapat bekerjasama dengan lembaga eksekutif.

f. Penetapan Aturan (*Rule Application*)

Fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif beserta jajaran birokrasinya. Tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan sebagai pedoman berperilaku, tetapi juga berarti pembuatan rincian dan pedoman pelaksanaan peraturan.

g. Penghakiman Aturan (*Rule Adjudication*)

Merupakan fungsi untuk menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut persoalan peraturan, pelanggaran peraturan dan penegasan fakta-fakta yang perlu untuk mendapatkan keadilan.

Alvin (2022:11) menjelaskan bahwa terdapat 10 fungsi komunikasi politik sebagai berikut :

- a. Memberi informasi kepada masyarakat atas aktivitas politik yang dilakukan oleh komunikator politik.
- b. Sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik.
- c. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai.
- d. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.
- e. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum, dan penggunaan hak mereka sebagai pemegang suara.

- f. Hiburan masyarakat sebagai 'pesta demokrasi' dengan menampilkan para juru kampanye, artis, dan para pundit politik.
- g. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari perpecahan bangsa.
- h. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi
- i. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat
- j. Media pers menjadi *watchdog* dalam membantu terciptanya *good governance* yang transparan dan bertanggung jawab

D. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum. Partisipasi ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, serta legal atau ilegal. Partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik. Masyarakat yang berpartisipasi dalam politik sadar bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut

serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Partisipasi politik dalam kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang berorientasi pada input dan output. Contohnya adalah memberikan saran dan kritik atas kebijakan pemerintah, membayar pajak dan ikut dalam pemilihan umum. Sementara itu, partisipasi pasif hanya berorientasi kepada output. Misalnya, menaati dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang tidak terlibat dalam kedua partisipasi ini. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput). Biasanya, kelompok ini menganggap masyarakat atau sistem politik yang ada telah menyimpang dari tujuan yang mereka cita-citakan.

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Hamid (2020:40) mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu:

1. Partisipasi Aktif

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Yang termasuk pada partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

2. Partisipasi Pasif

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses output. Kegiatan yang termasuk pada partisipasi pasif adalah kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik.

Raden *et al.*, (2019:17) mengemukakan definisi partisipasi politik sebagai berikut :

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadik, berlangsung secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dari definisi tersebut, partisipasi politik lebih difokuskan pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist professional* yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Adapun menurut Sukma dan Rahman (2018:7) tujuan dari partisipasi politik sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

2. Untuk mengontrol pemerintahan yang akan terpilih.
3. Sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok yang mempengaruhi pemerintah dengan jalan terlibat dalam politik.
4. Sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara yang pemerintahannya otoriter.
5. Membantu meringankan beban pemerintah, seperti terbukannya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya pemberian suara (voting) yang dilakukan suka rela.
6. Untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim pemerintah.

E. Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang disingkat menjadi Pemilu, merupakan salah satu pesta rakyat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Dan selanjutnya kata pemilu tersebut begitu akrab dengan permasalahan-permasalahan politik dan juga pergantian pemimpin. Pada dasarnya pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Dengan pelaksanaan pemilu diharapkan sekaligus menjadi prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme

pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain.

Pemilu memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di negara-negara dunia. Pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari.

Menurut Manuel Kasisepo dalam Agustri dan Sijaya (2021:2) mengatakan bahwa pemilihan umum adalah :

Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan *status quo* bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan *status quo* inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu. Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah sebuah keniscayaan. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan sebuah motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Pemilihan Umum (yang disebut juga dengan Pemilu) menurut Pasal I ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan

calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Jurdi, (2018:1). Mendefinisikan pengertian pemilihan umum sebagai berikut :

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai sarana bagi masyarakat umum untuk mencalonkan diri melalui partai politik agar nantinya dapat menjadi calon dalam kontestasi politik dalam periode tertentu. Hasil dari pemilihan umum tersebut akan melahirkan figur yang akan mengisi jabatan politik dalam lembaga pemerintahan.

Secara fundamental pemilihan umum menurut (Hutabarat, 2022:47). Yaitu sebagai berikut :

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari partisipasi rakyat namun dalam praktiknya justru hanya dibatasi sebagai pemilik suara dalam rutinitas pesta demokrasi sehingga bila akan di terapkan secara objektif maka kedaulatan rakyat setidaknya mampu menjadi pisau analisis kinerja pemerintah dalam menjalankan masa jabatannya sehingga pergeseran praktik kedaulatan rakyat yang selama ini terjadi dapat dikembalikan kepada makna semestinya

Perwujudan kedaulatan rakyat di Republik Indonesia harus dilaksanakan melalui pemilu karena pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Agar pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pemilu maka pemilu di Indonesia menganut asas-asas pemilu sebagai berikut (Sadi, 2021:240):

1. Langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum. Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun atau telah kawin berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang berumur 21 tahun berhak dipilih.
3. Bebas. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan

haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. **Rahasia.** Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.
5. **Jujur.** Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Adil.** Dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

F. Pemilih Pemula

1. Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia di bagiatas tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih

karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Menurut pasal I ayat (22) UU No. 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/belum kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Pengertian tersebut dapat di tarik simpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang di daftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pilkada. Dan baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pilkada yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pilkada) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula. dalam ritual demokrasi (pilkada) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula adalah sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.
2. Baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pilkada 2024

Pemilih pemula merupakan pemilih generasi baru (secara usia biologi), atau orang yang baru mendapat hak pilih. Mereka bisa menjadi pemilih loyal dan pemilih mengambang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Menurut Bastian (2022:36) pemilih pemula umumnya adalah :

Pemilih pemula adalah generasi muda yang ditengarai kaum yang sulit dididik, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik ataupun kontestan Pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya.

Pemilih pemula khususnya remaja mempunyai sikap kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan. Semua hal yang kurang menyenangkan akan mereka hindari. Di

luar kesenangan, kelompok sebaya sangat penting dalam kehidupan remaja. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihannya belum bulat. Dengan demikian, pemilih pemula merupakan *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih di setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilu. Pemilih pemula adalah pemilih baru pertama kali voting karena usia mereka baru masuk usia voting yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka tentang pemilu tidak jauh berbeda dengan kelompok lain, perbedaannya adalah soal semangat dan pilihan.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih menurut Sentosa dan Karya (2022:28) adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian).
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Menurut Nurokhib (2022) pada dasarnya pemilih pemula mempunyai karakter yang berbeda-beda dengan pemilih-pemilih yang sudah pernah terlibat dalam pemilu/pemilihan sebelumnya, yaitu:

1. Belum pernah memilih atau menjatuhkan pilihan di dalam Tempat Pemungutan Suara.
2. Belum memiliki pengalaman dalam memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang rasional dalam memilih.
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih semangat dan bergejolak, dan apabila tidak dikendalikan akan mempunyai efek terhadap konflik-konflik sosial didalam pemilu atau pemilihan.
6. Menjadi target peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Karakteristik pemilih pemula memang berbeda dengan pemilih lainnya. Oleh karena itu karena itu membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menciptakan dan membentuk pemilih pemula yang memiliki kematangan secara psikologis dalam proses pemilihan untuk menentukan dan mempertanggung jawabkan setiap pilihannya.

2. Kecenderungan Pemilih Pemula

Pada dasarnya pemilih pemula dimaknai dalam pemaknaan yang beragam, namun secara umum pemaknaan atas pemilih pemula diletakkan pada pemahaman sebagai “orang yang baru pertama kali memiliki hak memilih karena telah mencukupi usianya sesuai ketentuan”. Sebagai bagian dari masyarakat yang baru akan menggunakan hak pilihnya, segmen ini cenderung dilihat sebagai bagian dari masyarakat yang rentan secara politik baik terkait dengan pemahaman maupun kemandirian. Lebih lanjut, segmen ini masih cenderung dianggap sebagai segmen pemilih yang cenderung apatis sehingga membutuhkan strategi pendekatan khusus dalam memahami kecenderungan perilaku politiknya. Salah satu alasannya adalah terkait tingkat pemahaman politik mereka yang dianggap masih kurang atau belum

komprehensif sehingga kecenderungan politiknya dianggap masih belum stabil.

Lebih jauh, kecenderungan mereka dalam politik dianggap sebagai representasi dari kecenderungan dan orientasi politik orang tua atau keluarga. Dalam hal ini orang tua bahkan dianggap menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi pemahaman politik mereka. Hal ini nampaknya sangat terkait dengan kecenderungan pemahaman bahwa orang tua masih menjadi aspek utama dalam masa perkembangan berfikir mereka. Dengan demikian, maka sebagian besar pemahaman politik mereka dianggap didapatkan dari orang tua, terutama pada fase-fase awal pembentukan pemahaman awal mereka. Pemahaman ini masih cukup kuat mendasari asumsi tentang pembentukan pemahaman politik pemilih pemula. Namun dalam perkembangan dunia dewasa ini nampaknya terdapat kecenderungan pergeseran atas asumsi tersebut. Jika sebelumnya, posisi orang tua seolah menjadi sumber referensi politik paling penting terdapat kecenderungan bahwa para pemuda saat ini mendapatkan ruang dan sumber informasi baru yang nampaknya memberikan kesan yang cukup kuat pada pembentukan pemahaman politik mereka yakni media sosial. Hal ini tentu menjadi menarik jika melihat kecenderungan besarnya pengaruh media sosial saat ini dikalangan muda yang tentu saja didalamnya termasuk para pemilih pemula. Hal ini juga menjadi menarik mengingat potensi efek dari pemanfaatan sosial media dalam dunia politik saat ini yang memunculkan beberapa fenomena kontroversial terkait hoax dan penyebaran isu-isu negatif (Ekawati, 2021).

Masduki *et al.*, (2021:53) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor pendukung pemilih pemula dalam berpartisipasi pada pemilihan umum antara lain:

- 1) Penerimaan perangsang politik. Kepekaan individu terhadap rangsangan politik yaitu melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan media massa. Elemen tersebut akan berpengaruh bagi keikutsertaan individu dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa mendorong individu secara aktif terlibat dalam politik. Dengan mengikuti informasi politik melalui media massa, individu akan memiliki referensi dalam menyampaikan respon yang kemudian menjadi bahan dalam partisipasi politiknya. Meski dalam merespon rangsangan politik tersebut juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman-pengalaman, dan kepribadian yang melekat padanya. Pemilih pemula terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum karena ada rangsangan dari media masa atau eletronik.
- 2) Terkait dengan karakteristik sosial individu. Status ekonomi, suku, usia, jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda. Pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar hak politik mereka sebagai masyarakat, dengan ikut serta memilih pemimpin dengan datang ke TPS.
- 3) Terkait dengan sistem politik dan sistem partai tempat individu tinggal. Individu yang tinggal di negara demokratis, cenderung berpartisipasi

karena partai politiknya condong untuk mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Meski pemilih pemula memiliki karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun pemilih pemula cukup banyak yang masih peduli dan sadar akan hak politiknya.

- 4) Terkait dengan perbedaan regional, yang merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Pemilih pemula berpartisipasi berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari pihak lain, tidak adanya suatu hal yang otoriter.

G. Pemilihan Calon Presiden

Makna presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Presiden dan wakil presiden dengan seperangkat hak dan kewajibannya masing-masing atau tugas dan kewenangannya masing-masing, tidak ada keperluan untuk membedakan kapan ia bertindak sebagai kepala negara dan kapan ia berperan sebagai kepala pemerintahan seperti kebiasaan dalam sistem parlementer.

Selanjutnya kata “calon”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yakni: (1) orang yang akan menjadi; (2) orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu; (3) orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan sebuah definisi mengenai calon presiden, yakni adalah orang yang akan menjadi kepala pemerintahan atau kepala negara, sedangkan definisi calon wakil presiden ialah orang yang akan menjadi wakil atau pengganti kepala pemerintahan atau kepala

negara jika presiden meninggal, mengundurkan diri, akan dihapus dari kantor (diberhentikan), tidak dapat melayani atau tidak akan melayani (Marwono, 2021:72).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (I) UUD Tahun 1945 tentang persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden dirumuskan bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden.

Persyaratan tersebut sebagai upaya untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman di tengah-tengah masyarakat yang semakin demokratis, egaliter, dan berdasarkan *rule of law* yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara. Tidak ada pembedaan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Siapa pun warga negara yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal (Marwono, 2021:77).

Regulasi mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, diatur dalam UUD Republik Indonesia 1945. Tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen menerangkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dari satu pasangan langsung. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh sedikitnya satu partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik sejak sebelum pemilihan umum berlangsung. Presiden dan wakil presiden

yang terpilih adalah pasangan calon dengan jumlah perolehan suara lebih dari 50% dari keseluruhan suara, dan minimal mendapat 20% suara dari setiap provinsi di Indonesia. Sahnya peraturan tersebut secara otomatis menghilangkan wewenang MPR RI untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kedaulatan rakyat semakin diakui karena terlibat secara langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Ramadhani dan Maharani, 2022:53).

Menurut Sudrajat *et al.*, (2023:118), dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, maka berarti mereka mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata dari rakyat. Kemudian terdapat dua alasan mengapa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan secara langsung:

1. Pemilihan secara langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mayoritas kehendak rakyat;
2. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan presidensial.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diharapkan mampu menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis dan terlepas dari otoriter penguasa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta dapat membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya.